

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berada pada iklim tropis memiliki tanah subur yang memungkinkan berbagai jenis tanaman tumbuh berkembang sebagai kekayaan alam. Indonesia juga disebut sebagai negara agraris karena masyarakatnya sebagian besar bekerja pada sektor pertanian yang merupakan penopang perekonomian negara. Hal ini menunjukkan Indonesia menghasilkan berbagai macam produk pertanian terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Sektor pertanian merupakan sektor penting bagi pembangunan suatu negara atau daerah karena berkontribusi sangat besar terutama dalam penyediaan kebutuhan bahan pangan, pemenuhan bahan baku industri, berkontribusi terhadap devisa negara, berperan besar terhadap serapan tenaga kerja, dan juga dapat berpengaruh pada peningkatan pendapatan masyarakat setempat (Dewi, 2022). Diharapkan pemerintah Indonesia dapat membuat kebijakan-kebijakan yang dapat membantu para petani dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang stabil.

Pangan merupakan kebutuhan pokok untuk hidup bagi setiap manusia yang ketersediaannya harus cukup, baik dari jumlah dan mutu yang sehat serta aman secara berkelanjutan. Ketahanan pangan termasuk dalam suatu kondisi terpenuhinya pangan yang cukup bagi masyarakat dari segi kualitas maupun kuantitas. Komoditas pangan pokok di Indonesia sebagian besar adalah dari padi (Hamid, 2018). Konsumsi bahan pangan pokok khususnya komoditas padi sebagai beras dimana 95% masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras sebagai bahan pangan pokok Rata-rata konsumsi beras Indonesia dapat mencapai hampir 120 kg/kapita/tahun. lebih tinggi dibandingkan rata-rata konsumsi beras dunia yang

hanya sekitar 60 kg/kapita/tahun (Rafidah, 2024). Hal ini menunjukkan peran pertanian dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri khususnya komoditas padi sebagai beras. Petani yang bekerja keras membutuhkan peran pemerintah baik dalam permodalan maupun sarana dan prasarana.

Pemerintah memfasilitasi berbagai prasarana dan sarana pertanian, termasuk pupuk bersubsidi, sebagai upaya mendukung peningkatan sasaran produksi pertanian khususnya pada komoditas padi (Maman, 2021). Pupuk merupakan hal penting sebagai sarana produksi khususnya komoditas padi dalam pemenuhan nutrisi tanaman padi yang dapat meningkatkan produktivitas dan peningkatan produksi tanaman padi. Sejak tahun 1969 Menteri Pertanian Republik Indonesia menciptakan program pupuk bersubsidi guna meningkatkan produktivitas dan produksi pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani (Sujatmiko, 2025). Menurut Peraturan Permentan Nomor 10 Tahun 2022 Pasal 1 definisi pupuk bersubsidi adalah pupuk yang dalam pengadaan dan penyalurannya mendapatkan potongan harga dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian.

Kebutuhan petani padi sawah terhadap pupuk bersubsidi sangat urgen sebab pada masa sekarang ini, sulit bahkan dapat hampir dipastikan tanpa pupuk maka hasil panen akan gagal. Hal itu menyebabkan ketersediaan pupuk bersubsidi sangat berpengaruh terhadap produksi padi sawah. Selain ketersediaan pupuk bersubsidi tentu petani sangat berharap bahwa harga pupuk bersubsidi pada tingkat pengecer benar-benar sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sehingga tidak memberatkan petani (Tanjung, 2020).

Program pupuk bersubsidi di Indonesia, dirancang untuk meningkatkan produksi pertanian, khususnya pada tanaman pangan, yang diharapkan dapat

mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional (Faot *et al.*, 2022). Efektivitas program ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk cara distribusi pupuk yang tepat dan pemahaman petani tentang manfaat serta prosedur penggunaan pupuk bersubsidi tersebut (Rigi *et al.*, 2019). Program pupuk bersubsidi di Ghana telah dimulai sejak tahun 2008 Ghana Fertilizer Subsidy Program (GFSP). Program tersebut telah membantu peningkatan komoditas jenis sereal sebesar 24,5% (Tsiboe *et al.*, 2021).

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu wilayah di Jawa Timur memiliki peran penting dalam mendukung produksi padi. Wilayah ini dikenal sebagai daerah pertanian perkotaan, dimana sebagian besar petaninya mengusahakan tanaman pangan, khususnya padi, dengan menyesuaikan kondisi iklim dan ketersediaan lahan. Sebagai daerah penyangga kebutuhan pangan Jawa Timur, Sidoarjo tidak hanya dikenal sebagai kawasan industri, tetapi juga tetap mempertahankan fungsi agrarisnya. Data Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2024 menunjukkan bahwa di antara beberapa komoditas tanaman pangan utama yang diusahakan, padi masih mendominasi baik dari segi luas panen, produktivitas, maupun jumlah produksinya. Data mengenai luas lahan dan total produksi padi di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Luas Panen dan Produksi Padi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022-2024

Tahun	Luas Panen (Ha)	Perubahan (%)	Produksi Padi (Kw)	Perubahan (%)
2022	28.591	—	1.976.729	—
2023	27.258	-4,6	1.883.137	-4,7
2024	27.646	1,4	1.910.894	1,5

Sumber: BPS Kabupaten Sidoarjo, 2022-2024.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa selama periode 2022–2024, luas panen dan produksi padi di Kabupaten Sidoarjo mengalami fluktuasi. Seiring

dengan bertambahnya luas panen dan total produksi padi juga menunjukkan tren peningkatan, meskipun pada tahun 2023 terjadi penurunan yang signifikan. Penurunan tersebut disebabkan oleh kurangnya produktivitas atau faktor eksternal lain, seperti peningkatan bantuan sarana produksi pertanian, penerapan teknologi pertanian, dan inovasi budidaya. Data ini mengindikasikan bahwa padi merupakan komoditas pangan paling dominan dan strategis di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini sekaligus memperkuat peran Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu daerah lumbung padi Jawa Timur yang menjadi penopang ketahanan pangan di tingkat provinsi maupun nasional.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas sekitar 63.438,534 hektare atau setara dengan 634,39 km², serta dikenal sebagai kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi dan wilayah terkecil di provinsi tersebut. Secara geografis, Kabupaten Sidoarjo berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di bagian utara, Kabupaten Pasuruan di sebelah selatan, Kabupaten Mojokerto di bagian barat, serta Selat Madura di sisi timur. Wilayah administratif Kabupaten Sidoarjo terbagi menjadi 18 kecamatan yang masing-masing memiliki potensi untuk pengembangan sektor pertanian, terutama pada komoditas padi. Setiap kecamatan memberikan kontribusi berbeda terhadap produksi padi di tingkat kabupaten, baik dari segi luas panen, produktivitas, maupun total produksinya. Data Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo (2024) menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan antar kecamatan, dimana terdapat kecamatan dengan produksi padi sangat tinggi serta kecamatan dengan produksi padi rendah. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada data mengenai luas panen, produktivitas, dan produksi padi menurut kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Kw)
1.	Sidoarjo	672	68,64	46.128
2.	Buduran	793	68,64	54.591
3.	Candi	1.559	69,05	107.653
4.	Porong	902	68,37	61.670
5.	Krembung	1.332	68,88	91.749
6.	Tulangan	1.221	68,38	83.498
7.	Tanggulangun	2.057	69,56	143.089
8.	Jabon	2.105	68,69	144.592
9.	Krian	1.625	68,96	112.061
10.	Balongsendo	2.018	69,63	138.492
11.	Wonoayu	2.724	70,52	192.107
12.	Tarik	3.062	68,51	209.771
13.	Prambon	2.027	71,76	145.463
14.	Taman	1.102	68,86	75.878
15.	Waru	85	68,71	5.840
16.	Gedangan	894	68,64	61.361
17.	Sedati	869	67,84	58.955
18.	Sukodono	2.599	68,49	177.995
Total		27.646	68,96	1.906.468

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo, 2024.an

Berdasarkan Tabel 1.2, secara tidak langsung menunjukkan perbedaan yang signifikan antar kecamatan. Produksi padi tertinggi di Kabupaten Sidoarjo dimiliki oleh Kecamatan Tarik yang mencatatkan dengan total 209.771 kw, sebaliknya Kecamatan Waru memiliki produksi padi terendah yakni 5.840 kw. Kecamatan Sukodono sendiri tercatat sebagai produksi padi tertinggi kedua dengan luas panen padi sebesar 2.599 ha dengan produktivitas 68,49 kw/ha sehingga menghasilkan total produksi 177.995 kw. Kecamatan Sukodono di Kabupaten Sidoarjo berperan penting sebagai sentra produksi padi.

Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah peri-urban yang terus mengalami perkembangan. Kawasan ini, terutama Kecamatan Taman, Waru, Gedangan, Sukodono, Krian, Sidoarjo, Candi, dan Porong, menunjukkan karakter kota yang kuat melalui dominasi penggunaan lahan nonpertanian, tingginya kepadatan

bangunan, serta pertumbuhan penduduk yang pesat (Hapsari, 2018). Wilayah peri-urban secara umum merupakan zona transisi antara desa dan kota yang mengalami perubahan fungsi lahan secara dinamis, ditandai dengan bercampurnya karakter agraris dengan perkembangan permukiman, industri, dan pusat perdagangan, sehingga memengaruhi struktur sosial, ekonomi, dan mata pencaharian masyarakat. Kecamatan Sukodono sebagai wilayah peri-urban yang menghadapi tekanan urbanisasi, Kecamatan Sukodono tetap menunjukkan potensi pertanian yang kuat dan mencatat produksi padi tertinggi dibandingkan kecamatan peri-urban lainnya (Ardiansyah *et al.*, 2025). Terdiri atas 19 desa, seluruh wilayah Sukodono memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, yang dibuktikan melalui tingginya produksi dan luas lahan tanam padi di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1.3 Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi Menurut Desa di Kecamatan Sukodono, Tahun 2022

No	Desa	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Kw)
1.	Sukodono	106,06	6,60	700,00
2.	Klopo Sepuluh	137,30	6,80	933,64
3.	Masangan Wetan	45,16	6,60	298,06
4.	Suko	37,00	6,70	247,90
5.	Masangan Kulon	80,54	6,70	539,62
6.	Panjunan	21,67	6,50	140,86
7.	Cangkringsari	140,27	6,70	939,81
8.	Jogosatru	46,55	6,60	307,23
9.	Ngaresrejo	77,11	6,60	508,93
10.	Sambungrejo	107,34	6,70	719,18
11.	Plumbungan	60,98	6,80	414,66
12.	Bangsri	71,88	6,60	474,41
13.	Wilayut	79,52	6,80	540,74
14.	Kebonagung	60,42	6,50	392,73
15.	Anggaswangi	26,60	6,50	172,90
16.	Jumputrejo	101,67	6,40	650,66
17.	Suruh	59,21	6,70	396,71
18.	Pekarungan	48,12	6,70	322,40
19.	Pademonegoro	119,76	6,80	814,37
Total		1427,16	6,65	126,30

Sumber: Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukodono, 2022.

Berdasarkan Tabel 1.3, bahwa pada tahun 2022 Desa Cangkringsari memproduksi 939,81 Kw padi dengan luas lahan 140,27 Ha, sehingga menjadikannya desa dengan tingkat produksi padi tertinggi di Kecamatan Sukodono. Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono merupakan salah satu daerah di Kabupaten Sidoarjo. Luas wilayah Desa Cangkringsari sebesar 2,18 km². Mayoritas masyarakat Desa Cangkringsari mata pencahariannya adalah berwiraswasta dan bertani. Tercatat ada 252 petani padi yang menerima pupuk bersubsidi di Desa Cangkringsari yang tergabung dalam empat kelompok tani.

Kecamatan Sukodono mengimplementasikan program pupuk bersubsidi dari pemerintah Indonesia sebagai dukungan dalam mendukung ketahanan pangan nasional, karena itu setiap desa mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi. Program pupuk bersubsidi telah diterapkan sejak tahun 1970-an di Kecamatan Sukodono dengan pendampingan pihak BPP Sukodono. Setiap desa di Kecamatan Sukodono mendapatkan total alokasi pupuk bersubsidi berbeda-beda.

Di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, alokasi pupuk bersubsidi per desa tidak seragam karena didasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing desa, dan didasari oleh kebutuhan melalui luas lahan yang dimiliki tiap desa. Desa dengan lahan pertanian lebih luas mendapat alokasi lebih besar seperti Desa Cangkringsari. Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukodono mengemukakan bahwa Desa Cangkringsari memilki rencana tanam yang lebih luas dari desa lainnya yaitu sebesar 278,714 Ha. Desa Cangkringsari juga mendapatkan alokasi pupuk subsidi terbanyak yaitu pada pupuk Urea sebanyak 76.674 kg, dan pupuk NPK sebanyak 9.243 kg. Pemberian alokasi subsidi pupuk di Desa Cangkringsari merupakan sebuah program pupuk bersubsidi sebagai dukungan pemerintah dalam

meningkatkan produksi pertanian, khususnya pada tanaman pangan, yang diharapkan dapat mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

Program pupuk bersubsidi di Desa Cangkringsari sudah berjalan sejak awal tahun 1970-an, dan dalam proses distribusinya pupuk bersubsidi didistribusikan melalui lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik produsen. Kemudian disalurkan ke lokasi gudang pupuk di wilayah produsen yang berada di wilayah ibu kota provinsi. Kemudian disalurkan ke lokasi gudang produsen yang berada di wilayah kabupaten/kota. Kemudian disalurkan ke lokasi gudang atau kios pengecer pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan atau desa. Setelah itu pupuk bersubsidi siap dilakukan pennebusan oleh ketua kelompok tani dengan menggunakan kartu tanda penduduk dan sesuai dengan alokasi RDKK. Dalam pelaksanaannya Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukodono hadir sebagai penghubung antara petani, kios pengecer, hingga distributor, dan juga sebagai pengawas di lapangan guna memastikan proses distribusi pupuk bersubsidi berjalan akurat dan penyaluran tetap tepat sasaran.

Pupuk bersubsidi yang ditebus oleh petani di peruntukan bagi petani dengan luas tanah yang diusahakan paling luas 2 hektar setiap musim tanam dan diutamakan petani kecil yang melakukan usaha tani dengan lahan paling luas 0,5 hektar yang melakukan usaha tani pada 3 (tiga) subsektor, yaitu: Tanaman pangan, yaitu dengan komoditas padi, jagung, kedelai. Hortikultura, yaitu dengan komoditas cabai, bawang merah, bawang putih. Perkebunan, yaitu dengan komoditas tebu rakyat, kopi, dan kakao (Savitri dan Yuliani, 2024). Pembagian alokasi pupuk bersubsidi yang di berikan kepada petani di Desa Cangkringsari yaitu pupuk urea sebanyak 275 kg/2 ha dan pupuk NPK sebanyak 250 kg/2 ha.

Program pupuk bersubsidi di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dalam efektivitas pelaksanaan distribusi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang telah diatur dalam Permentan No.15 Tahun 2025 yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran penerima. Tujuh indikator ini menjadi alat ukur untuk mengevaluasi apakah distribusi pupuk bersubsidi benar-benar berhasil memenuhi kebutuhan petani dengan cara yang sesuai dan optimal. Meskipun program pupuk bersubsidi sudah dilakukan sejak lama, namun masih terdapat permasalahan yang mengakibatkan efektivitas pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi menjadi topik penting dari petani.

Permasalahan terkait pupuk bersubsidi di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, berdasarkan hasil pra penelitian dan dikonfirmasi oleh Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukodono antara lain adalah pernah terjadi keterlambatan distribusi pupuk bersubsidi hingga selama 1 minggu, dan timbul permasalahan terkait permasalahan administrasi ketika dilakukannya penebusan pupuk bersubsidi di kios pengecer. Permasalahan administrasi tersebut yaitu KTP yang buram, KTP patah, dan ketidaksesuaian data dengan sistem seperti kasus petani tercatat meninggal padahal masih hidup. Permasalahan ini mengakibatkan hambatan dalam penebusan pupuk secara kelompok, seperti keterlambatan penebusan, perubahan daftar kelompok, dan beban administratif bagi ketua kelompok tani, sehingga perlu untuk diteliti bagaimana efektivitas pendistribusian pupuk bersubsidi yang ada di Kecamatan Sukodono.

Distribusi pupuk pertanian merupakan aspek penting dalam keberhasilan usaha tani, karena ketersediaan pupuk yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan sangat memengaruhi produktivitas lahan. Efektivitas distribusi menjadi kunci untuk

menjaga keberlanjutan usaha tani dan kesejahteraan petani. Keterlambatan dalam distribusi pupuk bersubsidi, karena bahkan keterlambatan satu minggu saja dapat berdampak besar pada tanaman dan merugikan petani (Hermawan *et al.*, 2025). Ketika pupuk terlambat atau jumlahnya tidak mencukupi, petani sering harus membeli pupuk non-subsidi dengan harga lebih tinggi, yang pada akhirnya merugikan petani (Ansyah *et al.*, 2025). Ketepatan jenis, jumlah, waktu, sasaran, harga, dan mutu pupuk harus terjamin agar petani dapat menggunakannya sesuai kebutuhan budidaya. Penyaluran yang efektif tidak hanya meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga menciptakan rasa percaya petani terhadap pemerintah dan sistem distribusi yang diterapkan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Keberlanjutan program pupuk bersubsidi sangat dipengaruhi oleh partisipasi petani sebagai penerima manfaat. Partisipasi ini erat kaitannya dengan persepsi dan penilaian mereka terhadap kualitas implementasi program. Jika petani menilai bahwa distribusi pupuk bersubsidi berjalan baik misalnya, tidak ada kelangkaan, administrasi mudah, serta penebusan dilakukan sesuai harga HET, maka tingkat kepuasan dan kepercayaan mereka terhadap program akan meningkat. Penilaian yang positif tersebut mendorong petani untuk terus berpartisipasi dalam program, menjaga keterlibatan mereka dalam mekanisme penebusan, dan mendukung keberlanjutan kebijakan subsidi secara keseluruhan. Sementara apabila distribusi tidak berjalan dengan baik, maka penilaian petani terhadap program akan buruk dikarenakan tidak sesuai dengan harapan.

Berdasarkan implementasi program pupuk bersubsidi di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang menyoroti permasalahan yang timbul terkait distribusi pupuk bersubsidi yang berpotensi menimbulkan persepsi petani terhadap efektivitas distribusi pupuk

bersubsidi. Kondisi ini relevan jika dikaitkan dengan kondisi Kecamatan Sukodono khususnya Desa Cangkringsari, yang merupakan salah satu wilayah strategis karena memiliki luas lahan pertanian terluas dan alokasi pupuk bersubsidi terbanyak. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada keefektifan distribusi pupuk bersubsidi 6T (tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu), tanpa mengaitkannya secara langsung kepada persepsi petani terhadap keefektifan distribusi pupuk bersubsidi. Analisis terhadap persepsi petani penting untuk dipahami lebih dalam terkait keefektifan distribusi pupuk bersubsidi yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan cara menganalisis secara kuantitatif persepsi petani terhadap keefektifan distribusi pupuk bersubsidi yang sudah berjalan dengan fokus kajian pada Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pembaharuan terkait keefektifan distribusi pupuk bersubsidi yang sebelumnya 6T menjadi 7T (tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran), serta mengaitkannya dengan persepsi petani terhadap keefektifan distribusi pupuk bersubsidi yang sudah berjalan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam mendukung perencanaan kebijakan selanjutnya dan meningkatkan efektivitas distribusi pupuk bersubsidi di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini terwujud dari fenomena permasalahan yang timbul di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono dari pernah terjadi keterlambatan distribusi pupuk bersubsidi hingga selama 1 minggu, dan timbul permasalahan terkait permasalahan administrasi ketika dilakukannya penebusan pupuk bersubsidi di kios pengecer. Permasalahan administrasi tersebut seperti KTP yang buram, KTP patah,

dan ketidaksesuaian data dengan sistem seperti kasus petani tercatat meninggal padahal masih hidup. Akibatnya terjadi hambatan dalam penebusan pupuk secara kelompok, seperti keterlambatan penebusan, perubahan daftar kelompok, dan beban administratif bagi ketua kelompok tani. Meskipun program pupuk bersubsidi sudah berjalan lama, efektivitas distribusi pupuk bersubsidi dalam meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan petani menjadi topik penting bagi petani. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mempelajari lebih dalam mengenai persepsi petani terhadap efektivitas distribusi pupuk bersubsidi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas distribusi pupuk bersubsidi di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana persepsi petani mengenai efektivitas distribusi pupuk bersubsidi di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi petani terhadap efektivitas distribusi pupuk bersubsidi di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengukur tingkat efektivitas distribusi pupuk bersubsidi di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo
2. Menganalisis persepsi petani mengenai efektivitas distribusi pupuk bersubsidi di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.

3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani terhadap efektivitas distribusi pupuk bersubsidi di Desa Cangkringsari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat secara praktis dan teoritis bagi pembaca dan pihak-pihak yang terkait. Manfaat dari penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan sekaligus menjadi referensi berharga bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan kajian pada bidang yang sama di masa mendatang.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan koleksi pustaka yang bermanfaat, sehingga dapat menjadi bahan perbandingan dan rujukan bagi peneliti lain dalam menyusun penelitian pada bidang yang sama.

3. Bagi Petani

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan wawasan dan pemahaman mengenai permasalahan yang terjadi dan efektivitas distribusi pupuk bersubsidi yang sedang berjalan.

4. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program terkait distribusi pupuk bersubsidi dalam meningkatkan keefektifan distribusi pupuk bersubsidi yang lebih baik dimasa mendatang.